

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAIRI**

**TAHUN
2025 - 2029**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI
JALAN MERDEKA NOMOR 4 A SIDIKLANAG
KABUPATEN DAIRI**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempersiapkan landasan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang lebih berdaya dan berhasil guna pada kondisi keberlanjutan pembangunan daerah dalam kurun waktu peralihan/ transisi dari berakhirnya periodisasi Kepala Daerah Kabupaten Dairi, serta untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pembangunan sektor lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional. Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi secara keseluruhan.

Implementasi lebih lanjut, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Dairi dan sebagai bahan masukan yang sinkron dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi tahun 2025 – 2029.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra ini.

Sidikalang, 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG" at the top and "DINAS LINGKUNGAN HIDUP" at the bottom. In the center of the stamp is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Saut Maruli Tua Sinaga".

Saut Maruli Tua Sinaga, S.Sos

Pembina TK.I

NIP. 19730625 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Tahun 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Tahun 2024 – 2025 sekaligus berakhirnya periodesisasi Bupati/ Wakil Bupati Dairi periode tahun 2019 - 2024, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan disektor lingkungan hidup secara khusus dengan terjadinya bencana non alam pandemi Covid 19 telah menimbulkan masalah perekonomian nasional dan daerah serta rencana pemilu serentak di Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 direkomendasikan supaya dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 untuk menyesuaikan target – target sesuai dengan kebijakan pusat dan daerah. Dengan adanya RPJMD tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi juga harus melakukan penyusunan Renstra OPD Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi untuk periode 2025 – 2029, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dairi 2025 – 2029. Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Dairi. Dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup di kecamatan.

Dalam penyusunan Renstra perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan OPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra OPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 224);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 168);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi NomorTahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 –2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025 – 2029 yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
4. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PD bagian ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, identifikasi permasalahan, isu strategis dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN bab ini menyajikan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029. Cascading kinerja Perangkat Daerah memuat proses penjabaran dan penyelarasan kinerja mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, pada bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029
- BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi berpedoman kepada Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi:

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.

(2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyusunan program bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian penyediaan sarana dan prasaranadi bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan

- peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. pelayanan administratif dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas serta bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan kegiatan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas serta bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana dibidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara periodik dalam rangka efektivitas pembangunan bidang lingkungan hidup;
- g. mengorganisasikan, membina dan mengarahkan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

- h. melakukan pembinaan sumber daya manusia di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dinas secara lisan dan tertulis dalam rangkamengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan aset serta menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sertamelaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud uraian tugas sekretaris Dinas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional secretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
 - b. memfasilitasi administrasi perencanaan, program, pelaporan dan keuangan dan umum, kepegawaian dan aset;
 - c. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;

- d. membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang lingkungan hidup;
- e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
- h. membagi tugas dan menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah- langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;

- f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi, menelaah,

mensosialisasikan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- f. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menilai, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan, menyusun rekomendasi Rencana Program, instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, rekomendasi izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menelaah, menverifikasi, memfasilitasi, dan mensosialisasikan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang kesehatan masyarakat;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan penataan perlindungan pengelolaan

lingkungan hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya beracun dan Peningkatan Kapasitas

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- e. menyusun kebijakan dan informasi tentang pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pelaksanaan rekomendasi perizinan pengelolaan sampah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, pengumpul limbah bahan berbahaya beracun, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. menyusun kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pendampingan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan materi, metode dan pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, penyusunan kebijakan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- g. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan untuk pengelolaan

- sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup bidang.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan,

- perusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan pengendalian pencemaran

- lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. memfasilitasi kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah, penentuan baku mutu lingkungan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemar dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap sumber pencemar, penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan(laboratorium lingkungan), pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan pengadaan sarana prasarana, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, patung, monumen, dan pengadaan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pembuangan Sementara dan Ruang Terbuka Hijau;
 - g. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan

- pemeliharaan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

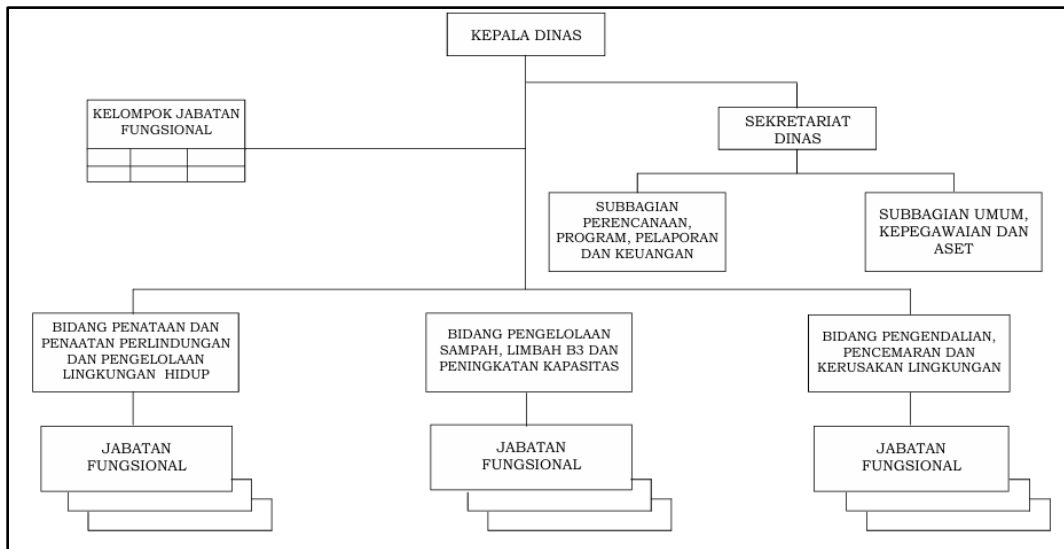
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Kabupaten Dairi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Aset.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi jabatan fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas membawahi jabatan fungsional

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi jabatan fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



b. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dan;
2. Sarana dan Prasarana.

b.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ditempatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 berjumlah 23 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 122 orang Tenaga Harian Lepas (THL) orang terdiri dari:

Tabel b.1.1 Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat/Gol. Ruang

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1	Pembina TK.1	IV/b	3
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata TK.I	III/d	3
4	Penata	III/c	5
5	Penata Muda TK.1	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	4
7	Pengatur	II/c	1
8	Pengatur Muda	II/a	2
9	Juru	I/c	2
10	Tenaga Harian Lepas	-	122
Jumlah			142 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Tahun 2024

Tabel b.1.2
Sumber Daya Manusia Menurut Strata Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	2	3
	ASN	
1	Magister (S-2)	3 Orang
2	Sarjana (S-1)	9 Orang
3	Sarjana Muda/ Ahli Madya (D-3)	3 Orang
4	SLTA	4 Orang
5	SMP	2 Orang
6	SD	2 Orang
Jumlah PNS		23 Orang
	Tenaga Harian Lepas	
1	Sarjana (S-1)	10 Orang
2	Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)	8 Orang

3	SLTA	78 Orang
4	SMP	13 Orang
5	SD	10 Orang
6	Tidak Sekolah	3 Orang
Jumlah THL		122 Orang
Total		145 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Tahun 2024

Tabel b.1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan dan Fungsi
Desember Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II	1 Orang
2	Pejabat Struktural Eselon III	4 Orang
3	Pejabat Struktural Eselon IV	2 Orang
4	Pejabat Fungsional	4 Orang
5	Fungsional Umum	12 Orang
6	Tenaga Harian Lepas	122 Orang
Total		145 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi Tahun 2024

b.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel b.2.1
Bangunan/Gedung

No	Uraian / Jenis	Alamat	Luas (M2)	Jumlah (unit)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Dinas	Jl. Merdeka No. 4A	311	1

2.	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	Desa Karing Kecamatan Berampu	170	1
3.	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	Desa Bintang Kecamatan Sidikalang	84	1

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester I (Satu) Tahun 2024

Tabel b.2.2
Kendaraan Dinas

No	Uraian / Jenis	Merk	Jumlah (unit)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Mazda/BT50	1
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota HILUX/Pick Up	1
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	Suzuki	1
4.	Kendaraan Dinas Roda 6	Mitsubishi	6
5.	Kendaraan Dinas Roda 6	Isuzu	2
6.	Kendaraan Dinas Roda 6	Hino	9
7.	Roda 2	Suzuki Thunder	2
8.	Roda 3 (Gerobak Sepeda Motor)	Viar (3 Unit), HTM (8 Unit)	17
9.	Alat berat	Pindad	1
10.	Kontainer Amrol	-	41

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester I (Satu) Tahun 2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dilakukan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan 6 (enam) sasaran kinerja yaitu:

1. Meningkatnya kualitas air;
2. Meningkatnya kualitas udara;

3. Meningkatnya kualitas lahan;
4. Penurunan emisi gas rumah kaca;
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.a dan selama kurun waktu 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.b sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 dan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.2

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
		Satuan	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Timbunan Sampah yang ditangani	%	59	68	62,96	72,35	106,71	106,39
2	Operasionalisasi TPA di Kabupaten	>71 (nilai TPA)	72.12	72.62	-	-	-	-
3	Jumlah Sampah yang tertangani di TPR	Ton	78.92	86.82	45.845	50,75	50,09	58,45
4	Persentase Cakupan Area pelayanan sampah	%	58.61	70.93	36,49	58,26	62,26	82,14
5	Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah b3	Unit						
6	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	75	78	100	100	133,33	128,21
7	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai indeks	65.6	65.35	63.05	83,81	96.11	128,25
8	Peningkatan indeks kualitas air	Nilai indeks	71	72	55.56	70	78.25	97,22
9	Peningkatan indeks kualitas udara	Nilai indeks	81	82	98.02	98,88	121.01	120,59
10	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Nilai indeks	50	51	42.45	79,65	84.90	156,18
11	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
12	Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	batang	5000	5000	3527	5657	70.54	113,14
13	Rehabilitasi lahan kritis	Ha	150	150	12.41	14,16	8.27	9,44
14	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	Lokasi	7	7	7	7	100	100
15	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	Dokumen	4	3	1	2	25	66,67
16	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.1.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Tahun 2022 - 2024

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada tahun ke-			
		Satuan	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,31	67,76	68,22	70,20	78,96	77,90	104,29	116,53	114,19
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	53,81	53,91	54,01	66,21	60,7	69,50	123,04	112,60	128,68
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,69	85,79	85,89	61,82	96,52	94,30	072,14	112,51	109,79
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	56,49	58,20	59,91	79,48	79,48	62,01	140,70	136,56	103,51
2	Predikat AKIP	Nilai AKIP	B	B	BB	B	B	BB	100,00	100,00	100,00

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 dari sebanyak 16 (enam belas) indikator ada sebanyak 6 (enam) indikator yang tercapai dan juga lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan yang realisasi di bawah seratus persen sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup baik itu sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia. Sedangkan pada tahun 2022 secara garis besar tercapai dengan baik hanya pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) realisasi capaian sebesar 72,14 persen dari target. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tercapai melebihi target.

Tabel 2.2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja	7.424.627.400	8.343.748.000	7.026.277.215	7.990.305.509	94,63%	95,76%	459.560.300	482.014.147
2	Belanja Tak Langsung	1.778.897.000	3.153.136.000	1.513.038.171	2.900.856.504	85,05%	92,00%		
3	Belanja Langsung	5.645.730.400	5.190.612.000	5.513.239.044	5.089.449.005	97,65%	98,05%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.514.346.400	2.728.997.000	2.482.266.357	2.664.200.705	98,72%	97,63%		
	- Penyediaan Jasa Surat-menyurat	2.900.000	1.750.000	2.086.800	1.747.000	71,96%	99,83%		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	40.000.000	45.000.000	23.033.060	29.939.875	57,58%	66,53%		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	47.097.000	62.597.000	33.908.372	49.724.398	72,00%	79,44%		
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	60.000.000	45.000.000	60.000.000	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	19.690.000	30.000.000	19.690.000	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.980.000	12.000.000	9.980.000	12.000.000	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	12.500.000	12.000.000	12.500.000	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	12.500.000	7.200.000	12.500.000	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	30.000.000	32.478.000	26.845.000	98,42%	89,48%		
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000	300.000.000	299.454.153	299.980.000	99,82%	99,99%		
	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.987.169.400	2.172.960.000	1.987.125.972	2.139.274.432	100,00%	98,45%		

	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	187.024.000	250.000.000	165.017.300	239.739.100	88,23%	95,90%		
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.853.000	6.000.000	6.840.000	6.000.000	99,81%	100,00%		
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.300.000	40.500.000	17.231.400	40.500.000	99,60%	100,00%		
	- Pengadaan mebeleur	-	13.500.000		13.500.000		100,00%		
	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	30.000.000	50.000.000	30.000.000	49.925.000	100,00%	99,85%		
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	119.996.000	120.000.000	102.146.300	118.484.100	85,12%	98,74%		
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.995.000	8.220.000	4.989.600	6.390.000	99,89%	77,74%		
	- Pemeliharaan Rutin/Peralatan Gedung Kantor	7.880.000	11.780.000	3.810.000	4.940.000	48,35%	41,94%		
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.880.000	-	38.880.000	-	100,00%		-	-
	- Pendidikan dan Pelatihan informal	38.880.000		38.880.000		100,00%			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%		-	-
	- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12.000.000		12.000.000		100,00%			
	- Penyusunan Renstra OPD dengan alokasi	10.000.000		10.000.000		100,00%			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.878.502.000	1.506.955.000	1.812.323.800	1.493.998.200	96,48%	99,14%	-	-
	- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	437.512.000	25.630.000	418.000.000	25.630.000	95,54%	100,00%		
	- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1.440.990.000	1.324.800.000	1.394.323.800	1.313.033.200	96,76%	99,11%		
	- Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan	-	156.525.000		155.335.000		99,24%		

	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	695.288.000	704.660.000	683.959.087	691.511.000	98,37%	98,13%	-	-
	- Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	120.000.000		118.992.500		99,16%			
	- Pemantauan Kualitas Lingkungan	65.000.000	100.000.000	64.503.000	99.184.000	99,24%	99,18%		
	- Pengkajian Dampak Lingkungan	298.288.000	-	295.898.587		99,20%			
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	162.000.000	-	154.765.000		95,53%			
	- Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata	50.000.000	-	49.800.000		99,60%			
	- Pengawasan sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	-	45.900.000		45.595.000		99,34%		
	- Konservasi sumber daya dan pengendalian sumber-sumber air	-	413.580.000		401.940.000		97,19%		
	- Pemeliharaan RTH	-	145.180.000		144.792.000		99,73%		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	68.690.000	-	68.588.000	-	99,85%		-	-
	- Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	68.690.000	-	68.588.000		99,85%			
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	125.000.000	-	124.808.000	-	99,85%		-	-
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	125.000.000	-	124.808.000		99,85%			
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	116.000.000	-	115.396.500	-	99,48%		-	-
	- Pengembangan data dan informasi lingkungan	116.000.000	-	115.396.500		99,48%			

Tabel 2.2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Belanja	20.214.338.858	9.654.910.084	11.300.425.182	18.690.697.207	8.964.322.000	10.655.874.786	92,46%	92,85%	94,30%	3.634.199.289	2.678.274.140
2	Belanja Tak Langsung	20.214.338.858	9.654.910.084	11.300.425.182	18.690.697.207	8.964.322.000	10.655.874.786	92,46%	92,85%	94,30%		
3	Belanja Langsung	20.214.338.858	9.654.910.084	11.300.425.182	18.690.697.207	8.964.322.000	10.655.874.786	92,46%	92,85%	94,30%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.377.983.994	4.238.321.592	3.760.823.728	5.052.116.858	3.706.067.546	3.400.826.192	93,94%	87,44%	90,43%		
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12.000.000	9.000.000	4.940.000	12.000.000	9.000.000	4.940.000	100,00%	100,00%	100,00%		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	9.000.000	4.940.000	12.000.000	9.000.000	4.940.000	100,00%	100,00%	100,00%		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.686.962	3.354.812.480	2.791.646.600	3.186.897.097	2.833.933.685	2.486.319.984	92,89%	84,47%	89,06%		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.430.686.962	3.354.812.480	2.791.646.600	3.186.897.097	2.833.933.685	2.486.319.984	92,89%	84,47%	89,06%		
3	Administrasi Kepegaw aian	-	-	42.040.000	-	-	33.496.400			79,68%		
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	42.040.000	-	-	33.496.400			79,68%		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.578.680	461.550.968	402.023.574	549.297.618	460.286.620	401.682.846	98,69%	99,73%	99,92%		
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.000.000	11.000.000	10.643.000	10.000.000	10.968.500	10.643.000	100,00%	99,71%	100,00%		
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan	61.288.680	58.550.968	43.057.724	61.288.680	58.447.148	43.057.724	100,00%	99,82%	100,00%		
	- Penyediaan barang cetakan dan	49.290.000	30.000.000	32.902.850	49.290.000	30.000.000	32.902.850	100,00%	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000	12.000.000	12.500.000	11.000.000	11.940.000	12.500.000	100,00%	99,50%	100,00%		

	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	425.000.000	350.000.000	302.920.000	417.718.938	348.930.972	302.579.272	98,29%	99,69%	99,89%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.434.880	198.647.540	231.176.400	951.824.000	198.472.614	228.382.300	95,43%	99,91%	98,79%	
	- Pengadaan Mebel	14.573.880	46.971.540	49.260.100	14.530.000	46.971.540	49.260.100	99,70%	100,00%	100,00%	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.961.000	71.020.800	114.580.300	70.644.000	70.983.619	111.786.200	99,55%	99,95%	97,56%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	911.900.000	80.655.200	67.336.000	866.650.000	80.517.455	67.336.000	95,04%	99,83%	100,00%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.500.000	41.700.000	119.100.000	29.953.703	40.189.523	84.141.533	61,76%	96,38%	70,65%	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.700.000	3.100.000	2.881.800	2.642.000	2.473.500	82,34%	71,41%	79,79%	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	38.000.000	116.000.000	27.071.903	37.547.523	81.668.033	60,16%	98,81%	70,40%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.783.472	172.610.604	169.897.154	322.144.440	164.185.104	161.863.129	96,80%	95,12%	95,27%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.495.472	155.548.604	158.537.154	205.765.940	148.740.104	151.398.129	95,49%	95,62%	95,50%	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.720.000	11.360.000	11.360.000	9.970.000	9.745.000	10.465.000	93,00%	85,78%	92,12%	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor and Bangunan Lainnya	97.910.000	-	-	97.809.000	-	-	99,90%			
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor and Bangunan Lainnya	8.658.000	5.702.000	-	8.599.500	5.700.000	-	99,32%	99,96%		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	166.600.000	-	224.691.000	159.593.000	-	200.229.434	95,79%		89,11%	
1	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPLH) kab/kota	-	-	14.691.000	-	-	13.927.000			94,80%	
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota			14.691.000			13.927.000			94,80%	
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/kota	166.600.000	-	210.000.000	159.593.000	-	186.302.434	95,79%		88,72%	
	- Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RRJMD	166.600.000		210.000.000	159.593.000		186.302.434	95,79%		88,72%	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	1.605.244.414	765.000.000	215.994.741	1.307.824.673	677.898.150	215.488.026	81,47%	88,61%	99,77%	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	100.000.000	150.000.000	-	97.955.000	107.216.100	-	97,96%	71,48%		
	- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udaran dan laut	100.000.000	150.000.000		97.955.000	107.216.100		97,96%	71,48%		
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	1.215.000.000	515.000.000	185.000.000	950.640.000	514.532.050	184.545.500	78,24%	99,91%	99,75%	
	- Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	1.215.000.000	515.000.000	185.000.000	950.640.000	514.532.050	184.545.500	78,24%	99,91%	99,75%	
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	290.244.414	100.000.000	30.994.741	259.229.673	56.150.000	30.942.526	89,31%	56,15%	99,83%	
	- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	290.244.414	100.000.000	30.994.741	259.229.673	56.150.000	30.942.526	89,31%	56,15%	99,83%	

	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati)	228.306.000	300.000.000	469.864.070	215.729.900	269.795.450	468.524.960	94,49%	89,93%			
1	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	228.306.000	300.000.000	469.864.070	215.729.900	269.795.450	468.524.960	94,49%	89,93%			
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	228.306.000	300.000.000	469.864.070	215.729.900	269.795.450	468.524.960	94,49%	89,93%			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1.559.000.000	159.450.000	-	1.209.256.200	159.450.000	-	77,57%	100,00%			
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.559.000.000	159.450.000	-	1.209.256.200	159.450.000	-	77,57%	100,00%			
	- Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.559.000.000	159.450.000	-	1.209.256.200	159.450.000	-	77,57%	100,00%			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	60.000.000	273.786.488	100.000.000	58.495.000	250.421.688	99.855.000	97,49%	91,47%	99,86%		
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha	60.000.000	273.786.488	100.000.000	58.495.000	250.421.688	99.855.000	97,49%	91,47%	99,86%		
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	273.786.488	100.000.000	58.495.000	250.421.688	99.855.000	97,49%	91,47%	99,86%		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	100.000.000	-	-	99.990.000	-	-	99,99%				
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	100.000.000	-	-	99.990.000	-	-	99,99%				
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000			99.990.000			99,99%				
	Program Pengelolaan Persampahan	11.117.204.450	3.868.352.004	6.349.051.643	10.587.691.576	3.851.329.166	6.097.378.174	95,24%	99,56%	96,04%		
1	Pengelolaan Sampah	11.117.204.450	3.868.352.004	6.349.051.643	10.587.691.576	3.851.329.166	6.097.378.174	95,24%	99,56%	96,04%		
	- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota		60.000.000			55.659.000			92,77%			
	- Penanganan sampah dengan meakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.777.680.450	3.678.352.004	6.349.051.643	3.679.744.076	3.669.569.166	6.097.378.174	97,41%	99,76%	96,04%		

	-	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.339.524.000	130.000.000		6.907.947.500	126.101.000		94,12%	97,00%		
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			-	50.000.000	-	-	49.360.000	-				
1		<i>Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	-	50.000.000	-	-	49.360.000	-				
	-	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dengan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	-	50.000.000	-	-	49.360.000	-				
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk			-	-	180.000.000	-	-	173.573.000	96,43			
2		Penyelenggaraan pendidikan, dan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan	-	-	180.000.000	-	-	173.573.000	96,43			
	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	-	-	180.000.000	-	-	173.573.000	96,43			

Jika diperhatikan pada tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 maka realisasi anggaran secara garis besar tercapai dengan baik, rata-rata tercapai lebih dari sembilan puluh persen.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam 5 (lima) tahun ke depan melayani kelompok masyarakat dalam bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Perencanaan strategis tahun 2025 – 2029 Dinas Lingkungan Hidup mendukung tercapainya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2025 – 2029, terdapat program prioritas Pembangunan Daerah yang dikelompokkan melalui pendekatan slogan Pembangunan berupa 10 (sepuluh) Program Unggulan. Dinas Lingkungan Hidup mendukung program unggulan yang ke sepuluh yaitu **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (Dairi Hijau)** dengan melakukan:

- a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b) Optimalisasi pengolahan sampah;
- c) Peningkatan Upaya keikutsertaan Masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- d) Penghijauan pada lahan-lahan kritis.

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini mendukung program prioritas yang menjadi instrument operasional yang menghubungkan misi Pembangunan dengan aksi nyata di lapangan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tidak terlepas dari penyelarasan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 adalah :
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

MISI 1.

Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif

MISI 2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

MISI 3.

Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas

MISI 4.

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa

MISI 5.

Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2029, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mendukung pelaksanaan misi nomor 2 yaitu: Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi ke-2 tersebut disusunlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

Tujuan: **Terwujudnya kualitas lingkungan hidup**

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun Rencana Strategis urusan lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024. Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan sektoral jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Rumusan visi dan misi KLHK disusun agar selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional dibidang lingkungan hidup dan kehutanan

Tabel 2.2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran KLHK 2020 - 2024

Visi : Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah - Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan - Menurunnya laju penyusutan hutan

2	Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	Aktualisasi potensi ekonomidari sumber daya hutan dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah - Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan - Meningkatnya penerimaan negara dari LHK - Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
3	Mewujudkan keberdayaanmasyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secaraadil dan setara	Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan - terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate - Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas - Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien

Pada Dokumen Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung 4 (empat) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.2.3 KLHK Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

No	Prioritas Nasional (PN) / Agenda Pembangunan (AP)	Program Prioritas (PP)
1	PN / AP 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP 2 : Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi

2	PN / AP 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 4 : Pembangunan wilayah Kalimantan
3	PN / AP 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP 6 : Pengentasan kemiskinan
		PP 7 : Peningkatan produktivitas dan daya Saing
4	PN / AP 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP 1 : Peningkatan kualitas lingkungan Hidup
		PP 2 : Peningkatan ketahanan bencana dan Iklim
		PP 3 : Pembangunan rendah karbon

Menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional di tingkat daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan tujuan, sasaran serta target kinerja sesuai kewenangannya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) KLHK Tahun 2020 – 2024.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Dairi berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten Dairi, rencana struktur wilayah kabupaten Dairi, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Dairi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi dan arahan peendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi.

Tujuan Penataan Ruang :

1. Masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman

2. Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai
3. Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
4. Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Kondisi lahan semakin mengkhawatirkan dengan indikator semakin berkurangnya luas kawasan hutan dan meningkatnya lahan kritis akibat aktivitas di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan yang kurang memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan terutama di daerah pedesaan. Sementara di daerah perkotaan penurunan kondisi lahan berkaitan dengan pengelolaan kebersihan (sampah), penataan estetika yang belum maksimal. Dalam menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Dairi juga didukung dengan pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan Kabupaten Dairi meliputi pengelolaan sampah dari sumber sampah, penanganan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan taman-taman kota sebagai salah satu komponen dalam ruang terbuka hijau kota juga ditujukan untuk meningkatkan keindahan kota.

Telaahan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Analisis terhadap dokumen KLHS diperlukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal kaitannya terhadap KLHS tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dinyatakan tidak memiliki implikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi terkait urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyediaan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca, penanganan lahan kritis.

2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.

3. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang baik, peningkatan persentase sampah yang ditangani, peningkatan produk yang ramah lingkungan.

4. Program pengelolaan persampahan.

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan peningkatan persentase sampah yang ditangani, peningkatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan peningkatan perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, peningkatan produk ramah lingkungan, peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat dan teregister.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi yaitu :

1. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan PD terkait;
2. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS;
3. Koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung terlaksananya program KLHS;

4. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program KLHS.

e. Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode sebelumnya sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita – cita dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Renstra periode sebelumnya serta hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beberapa isu – isu strategis pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara Lestari;
2. Belum optimalnya penanganan pencemaran air, tanah dan udara;
3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah
4. Berkurangnya tutupan lahan hijau.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu tertentu atau tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta isu-isu analisis strategis.

Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 maka **tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Dairi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merumuskan sasaran yang mendukung RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029. sasaran sebagai berikut: (1). Meningkatnya kualitas air, (2). Meningkatnya kualitas udara, (3). Meningkatnya kualitas lahan, (4). Penurunan emisi Gas Rumah kaca (GRK), (5). Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati, (6). Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
Lingkungan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) (poin)	77,90	78,07	78.24	78.41	78.58	78.75	78.92	
		1. Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	69.50	74.61	74,81	75,01	75,21	75,41	75,61	
		2. Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	94.30	83.79	83,99	84,19	84,39	84,59	84,79	
		3. Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	62.01	68.08	68,15	68.22	68,29	68,36	68,43	
		4. Penurunan emisi Gas Rumah kaca (GRK)	Penurunan intensitas emisi GRK	N/A	1332 86,46	15226 5,50	17519 1,59	2019 21,24	2283 62,68	2586 25,94	
		5. Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman hayati	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	N/A	0,562	0,566	0,570	0,575	0,581	0,585	
		6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	79.57	79,87	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

Penahapan Pembangunan Adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan renstra disajikan dalam table 3.2

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap VI (2030)
Implementasi Awal dan Konsolidasi: 1. Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup	Penguatan dan Ekspansi: 1. Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup	Perluasan dan Optimalisasi: 1. Penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Pengoptimalan Pelaksanaan Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup	Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian: 1. Penyelesaian Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup	Keberlanjutan Legacy: 1. Penyiapan Skema Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup lanjutan
2. Penataan struktur dan peningkatan kapasitas	2. Akselerasi sinergitas program Dinas	2. Optimalisasi sinergitas program Dinas	2. Penguatan sinergitas program Dinas	2. Pelembagaan sistem integrasi kelembagaan dan

kelembagaan, serta koordinasi lintas Lembaga dan sektor	Lingkungan Hidup dan lintas pemerintah pusat-daerah	Lingkungan Hidup dan lintas pemerintah pusat-daerah	Lingkungan Hidup dan lintas pemerintah dan pusat-daerah	kolaborasi multipihak
3. Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan	3. Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi	3. Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi	3. Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat	3. Finalisasi regulasi pendukung pembangunan
4. Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	4. Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	4. Optimalisasi Kemitraan berbasis program unggulan dan berdampak	4. Konsolidasi lanjutan kemitraan berbasis pro3gram unggulan dan berdampak	4. Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Arah kebijakan pada perangkat daerah: 1. Peningkatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 3. Penanganan pengaduan lingkungan hidup. 4. Pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3. 6. Peningkatan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup. 7. Peningkatan penanganan timbulan sampah, peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Peningkatan cakupan area pelayanan sampah

Tabel 3.3
Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	

			<p>2. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3.</p> <p>3. Peningkatan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>4. Peningkatan penanganan timbulan sampah, peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Peningkatan cakupan area pelayanan sampah</p>	
--	--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) program prioritas dan 1 (satu) program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Secara lengkap, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah

TABEL 4.1 PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.012.517.866		20.882.282.168		22.959.630.320		25.267.561.423		27.713.003.295
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.374.817.866		8.080.812.168		8.888.893.320		9.777.782.723		10.755.560.995
Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.374.817.866	100	8.080.812.168	100	8.888.893.320	100	9.777.782.723	100	10.755.560.995
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.420.000.000		1.562.000.000		1.717.200.000		1.890.020.000		2.079.022.000
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1.420.000.000	100	1.562.000.000	100	1.717.200.000	100	1.890.020.000	100	2.079.022.000
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.190.000.000		1.309.000.000		1.439.900.000		1.583.890.000		1.742.279.000
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69,5	74,61	74,81	1.190.000.000	75,01	1.309.000.000	75,21	1.439.900.000	75,41	1.583.890.000	75,61	1.742.279.000
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,3	83,79	83,99		84,19		84,39		84,59		84,79	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					940.000.000		1.034.000.000		1.137.400.000		1.251.140.000		1.300.000.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	940.000.000	100	1.034.000.000	100	1.137.400.000	100	1.251.140.000	100	1.300.000.000

2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		150.000.000
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	150.000.000
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					84.700.000		93.170.000		102.487.000		112.735.700		130.000.000
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	100	112.735.700	100	130.000.000
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000

Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.493.000.000		8.242.300.000		9.056.650.000		9.973.183.000		10.970.501.300
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	17,7	17,71	17,72	7.493.000.000	17,73	8.242.300.000	17,74	9.056.650.000	17,75	9.973.183.000	17,76	10.970.501.300
TOTAL KESELURUHAN					19,012,517,866		20,882,282,168		22,959,630,320		25,267,561,423		27,713,003,295

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
					Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya kualitas udara			Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga pendidikan masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	
				Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya kualitas lahan			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga pendidikan masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)			Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
					Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)		
			Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	69,5	74,61	74,81	75,01	75,21	75,41	75,61	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,3	83,79	83,99	84,19	84,39	84,59	84,79	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	62,01	68,08	68,15	68,22	68,29	68,36	68,43	
4	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	N/A	133.286,46	152.265,5	175.191,59	201.921,24	228.362,68	258.625,94	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	79,57	79,87	80	81	82	83	84	
2	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	17,7	17,71	17,72	17,73	17,74	17,75	17,76	
5	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase RTH	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.012.517.866		20.882.282.168		22.959.630.320		25.267.561.423		27.713.003.295	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.374.817.866		8.080.812.168		8.888.893.320		9.777.782.723		10.755.560.995	
Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	7.374.817.866	100	8.080.812.168	100	8.888.893.320	100	9.777.782.723	100	10.755.560.995	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.200.000		26.620.000		29.282.000		32.211.000		33.000.000	
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	2	32.211.000	2	33.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.200.000		14.520.000		15.972.000		17.570.000		18.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	2	17.570.000	2	18.000.000	
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		15.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	11.000.000	5	12.100.000	5	13.310.000	5	14.641.000	5	15.000.000	
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.096.426.979		5.575.582.192		6.134.240.347		6.747.863.652		7.408.505.442	
Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	5.096.426.979	25	5.575.582.192	25	6.134.240.347	25	6.747.863.652	25	7.408.505.442	
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.096.426.979		5.575.582.192		6.134.240.347		6.747.863.652		7.408.505.442	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	5.096.426.979	25	5.575.582.192	25	6.134.240.347	25	6.747.863.652	25	7.408.505.442	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	
Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5	110.000.000	5	121.000.000	5	133.100.000	5	146.410.000	5	161.051.000	
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5	110.000.000	5	121.000.000	5	133.100.000	5	146.410.000	5	161.051.000	
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				669.350.000		736.285.000		809.913.500		890.904.850		979.994.450	
Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	669.350.000	4	736.285.000	4	809.913.500	4	890.904.850	4	979.994.450	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4				
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				14.850.000		16.335.000		17.968.500		19.765.350		21.741.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	14.850.000	4	16.335.000	4	17.968.500	4	19.765.350	4	21.741.000	
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.500		72.472.950	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	49.500.000	12	54.450.000	12	59.895.000	12	65.884.500	12	72.472.950	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	38.500.000	12	42.350.000	12	46.585.000	12	51.243.500	12	56.367.850	
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500		24.157.650	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	16.500.000	4	18.150.000	4	19.965.000	4	21.961.500	4	24.157.650	
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	12	805.255.000	
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.800.000		275.880.000		303.468.000		333.814.800		367.195.480	
Persentase dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	250.800.000	4	275.880.000	4	303.468.000	4	333.814.800	4	367.195.480	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				74.800.000		82.280.000		90.508.000		99.558.800		109.514.680	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	74.800.000	6	82.280.000	6	90.508.000	6	99.558.800	6	109.514.680	
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		128.840.800	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	88.000.000	5	96.800.000	5	106.480.000	5	117.128.000	5	128.840.800	
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		128.840.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	88.000.000	4	96.800.000	4	106.480.000	4	117.128.000	4	128.840.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.700.000		162.570.000		177.727.000		195.299.700		231.408.030	
Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	148.700.000	12	162.570.000	12	177.727.000	12	195.299.700	12	231.408.030	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.400.000		4.840.000		5.324.000		5.856.400		24.420.400	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	4.400.000	12	4.840.000	12	5.324.000	12	5.856.400	12	24.420.400	
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.300.000		136.730.000		150.403.000		165.443.300		181.987.630	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	124.300.000	12	136.730.000	12	150.403.000	12	165.443.300	12	181.987.630	
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		21.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.075.340.887		1.182.874.976		1.301.162.473		1.431.278.721		1.574.406.593	
Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.075.340.887	1	1.182.874.976	1	1.301.162.473	1	1.431.278.721	1	1.574.406.593	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	38	38		38		38		38				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	18		18		18		18				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	35	38		38		38		38				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				952.240.887		1.047.464.976		1.152.211.473		1.267.432.621		1.394.175.883	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	38	38	952.240.887	38	1.047.464.976	38	1.152.211.473	38	1.267.432.621	38	1.394.175.883	
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500		24.157.650	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	18	16.500.000	18	18.150.000	18	19.965.000	18	21.961.500	18	24.157.650	
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600		9.663.060	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	35	38	6.600.000	38	7.260.000	38	7.986.000	38	8.784.600	38	9.663.060	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				1.420.000.000		1.562.000.000		1.717.200.000		1.890.020.000		2.079.022.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	1.420.000.000	100	1.562.000.000	100	1.717.200.000	100	1.890.020.000	100	2.079.022.000	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000	
Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	-	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	1	483.153.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000	
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	-	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	1	483.153.000	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				1.090.000.000		1.199.000.000		1.317.900.000		1.450.790.000		1.595.869.000	
Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.090.000.000	1	1.199.000.000	1	1.317.900.000	1	1.450.790.000	1	1.595.869.000	
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1						
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				650.000.000		715.000.000		785.500.000		865.150.000		951.665.000	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	650.000.000	1	715.000.000	1	785.500.000	1	865.150.000	1	951.665.000	
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	440.000.000	1	484.000.000	1	532.400.000	1	585.640.000	1	644.204.000	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.190.000.000		1.309.000.000		1.439.900.000		1.583.890.000		1.742.279.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69,5	74,81	1.190.000.000	75,01	1.309.000.000	75,21	1.439.900.000	75,41	1.583.890.000	75,61	1.742.279.000	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,3	83,99		84,19		84,39		84,59		84,79		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000	
Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	-	10	440.000.000	10	484.000.000	10	532.400.000	10	585.640.000	10	644.204.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	-	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	-	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1		1		1		1		1		1	
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				100.000.000		111.000.000		123.100.000		136.410.000		151.051.000		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	111.000.000	1	123.100.000	1	136.410.000	1	151.051.000		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				90.000.000		101.000.000		113.100.000		126.410.000		141.051.000		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	90.000.000	1	101.000.000	1	113.100.000	1	126.410.000	1	141.051.000		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				100.000.000		111.000.000		123.100.000		136.410.000		151.051.000		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	-	10	100.000.000	10	111.000.000	10	123.100.000	10	136.410.000	10	151.051.000		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				100.000.000		106.000.000		116.100.000		126.410.000		136.051.000		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	106.000.000	1	116.100.000	1	126.410.000	1	136.051.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				50.000.000		55.000.000		57.000.000		60.000.000		65.000.000	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000	
Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	90.000.000	1	99.000.000	1	108.900.000	1	119.790.000	1	131.769.000	
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	90.000.000	1	99.000.000	1	108.900.000	1	119.790.000	1	131.769.000	
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		966.306.000	
Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	-	50	660.000.000	50	726.000.000	50	798.600.000	50	878.460.000	50	966.306.000	
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		966.306.000	
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	-	50	660.000.000	50	726.000.000	50	798.600.000	50	878.460.000	50	966.306.000	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				940.000.000		1.034.000.000		1.137.400.000		1.251.140.000		1.300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	940.000.000	100	1.034.000.000	100	1.137.400.000	100	1.251.140.000	100	1.300.000.000	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				940.000.000		1.034.000.000		1.137.400.000		1.251.140.000		1.300.000.000	
Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	-	1	940.000.000	1	1.034.000.000	1	1.137.400.000	1	1.251.140.000	1	1.300.000.000	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1,97	2		2		2		2		2		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				740.000.000		834.000.000		937.400.000		1.051.140.000		1.100.000.000	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1,97	2	740.000.000	2	834.000.000	2	937.400.000	2	1.051.140.000	2	1.100.000.000	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	
Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	-	20	70.000.000	20	77.000.000	20	84.700.000	20	93.170.000	20	102.487.000	
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	-	20	70.000.000	20	77.000.000	20	84.700.000	20	93.170.000	20	102.487.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		150.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	150.000.000	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		150.000.000	
Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	25	25	110.000.000	25	121.000.000	25	133.100.000	25	146.410.000	25	150.000.000	
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		150.000.000	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	25	25	110.000.000	25	121.000.000	25	133.100.000	25	146.410.000	25	150.000.000	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				84.700.000		93.170.000		102.487.000		112.735.700		130.000.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terekait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	100	112.735.700	100	130.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				84.700.000		93.170.000		102.487.000		112.735.700		130.000.000	
Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	-	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.487.000	1	112.735.700	1	130.000.000	
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				84.700.000		93.170.000		102.487.000		112.735.700		130.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	-	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.487.000	1	112.735.700	1	130.000.000	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	17	50	330.000.000	50	363.000.000	50	399.300.000	50	439.230.000	50	483.153.000	
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	-	100		100				100		100		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	-	30		30		30		30		30		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	-	100	110.000.000	100	121.000.000		133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	
2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	-	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000	30	161.051.000	
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	17	50	110.000.000	50	121.000.000	50	133.100.000	50	146.410.000	50	161.051.000	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7.493.000.000		8.242.300.000		9.056.650.000		9.973.183.000		10.970.501.300	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	17,7	17,72	7.493.000.000	17,73	8.242.300.000	17,74	9.056.650.000	17,75	9.973.183.000	17,76	10.970.501.300	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				7.493.000.000		8.242.300.000		9.056.650.000		9.973.183.000		10.970.501.300	
Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15	7.493.000.000	15	8.242.300.000	15	9.056.650.000	15	9.973.183.000	15	10.970.501.300	
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	10		10		10		10		10		
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	11.097,9	15.961,54		16.431		16.900,46		17.369,91		17.369,91		
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	11.097,9	15.961,54		16.431		16.900,46		17.369,91		17.369,91		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	-	10		10		10		10		10		
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	-	30		32		34		34		34		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	-	2		2		2		2		2		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	-	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				5.038.000.000		5.541.800.000		6.086.800.000		6.707.128.000		7.379.340.800	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	-	10	5.038.000.000	10	5.541.800.000	10	6.086.800.000	10	6.707.128.000	10	7.379.340.800	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				85.000.000		93.500.000		102.650.000		113.135.000		124.448.500	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	-	1	85.000.000	1	93.500.000	1	102.650.000	1	113.135.000	1	124.448.500	
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		1.610.510.000	
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	10	1.100.000.000	10	1.210.000.000	10	1.331.000.000	10	1.464.100.000	10	1.610.510.000	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	11.097,9	15.961,54	700.000.000	16.431	770.000.000	16.900,46	847.000.000	17.369,91	931.700.000	17.369,91	1.024.870.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		322.102.000	
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	-	30	220.000.000	32	242.000.000	34	266.200.000	34	292.820.000	34	322.102.000	
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000	
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15	80.000.000	15	88.000.000	15	96.800.000	15	106.480.000	15	117.128.000	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		322.102.000	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	11.097,9	15.961,54	220.000.000	16.431	242.000.000	16.900,46	266.200.000	17.369,91	292.820.000	17.369,91	322.102.000	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
2.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
3.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
4.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Dairi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dan/atau target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang telah tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini.

Sidikalang,

2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN DAIRI



SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001